

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN  
KERJA (PHK) SEPIHAK PADA MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI  
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDARI NOMOR 16/PDT.SUS-  
PHI/2020/PN KDI)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada Fakultas Syariah  
IAIN Kendari

Oleh

**ARDIANSYAH**

NIM: 17020102025

**FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI  
KENDARI**

**2022**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penelitian ini berjudul “**Analisis Hukum Islam Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 16/PDT.SUS-PHI/2020/PN KDI)**” yang ditulis oleh **Ardiansyah, NIM. 17020102025**, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk selanjutnya siap mengikuti ujian skripsi.

Kendari, 16 Juni 2022

Mengetahui,

**Pembimbing 1**

**Pembimbing 2**



**DR. ASHADI L. DIAB M.A., M.Hum**

**NIP. 197905172009011008**



**RUSNAM S.H., MH.**

**NIP. 20160101024**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 16/PDT.SUS-PHI/2020/PN KDI)” yang ditulis oleh Ardiansyah, NIM 17020102025, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kendari, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diseleggarakan pada hari kamis, 30 Juni 2022 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah.

### DEWAN PENGUJI

Ketua : **Dr. Ashadi L. Diab M.A.,M.HUm**

(.....*Ashadi L. Diab*.....)

Sekretaris : **Rusnam S.HI.,MH**

(.....*Rusnam S.HI.*.....)

Anggota : **H. Muhammad Iqbal Lc.,MHI**

(.....*H. Muhammad Iqbal Lc.*.....)

Anggota : **La Ode Muhammad Iman Abdi Anantomo**  
**Uke M.H**

(.....*La Ode Muhammad Iman Abdi Anantomo*.....)  
(.....*Uke M.H*.....)

Kendari, 30 Juni 2022

Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Ipandang M. Ag**

**NIP. 196504022005012**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrabbi'l'alamin puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wata'ala atas berkat rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan hasil peneltian penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 16/PDT.SUS-PHI/2020/PN KDI)” tepat pada waktunya. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Rasulullah SAW, sebagai tokoh revolusioner yang telah merubah tatanan kehidupan dari kejahiliahan menjadi hikmah dan tentram. Hasil peneltian ini ditulis dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana (S1) di IAIN Kendari.

Penulis menyadari bahwa hasil peneltian ini dapat diselesaikan berkat do'a, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, terkhusus terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orangtua penulis, Bapak Basri Sila dan Ibu Hasriati. Penulis juga berterima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi dalam menyelesaikan hasil peneltian ini, yaitu:

1. Prof. Dr. Faizah Binti Awad, M.Pd selaku Rektor IAIN Kendari yang telah memberikan dukungan sarana dan fasilitas serta kebijakan yang mendukung penyelesaian studi penulis;
2. Dr. Ipandang M. Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah IAIN Kendari yang telah memberikan dukungan;
3. Andi Novita Mudriani Djaoe SH, MH sebagai ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah;

4. Dr. Ashadi L. Diab SHL., M.Hum., selaku pembimbing saya yang selalu memberikan dukungan dan masukan serta menuntun saya dalam menyelesaikan penelitian ini;
5. Dr. Andi Yaqub MHI. dan La Ode Muhammad Iman Abadi Anantomo Uke SH., MH., sebagai dosen penguji yang telah memberikan kritik, petunjuk dan saran serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini;
6. Kepada seluruh dosen dan staf tata usaha Fakultas Syariah IAIN Kendari yang telah memberikan dukungan dan ilmu yang bermanfaat dengan sikap yang ramah dan cekatan dalam melayani penulis selama menyelesaikan pendidikan di Fakultas Syariah;
7. Instansi Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas 1A Kendari beserta jajarannya yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini;
8. Kakak saya, Nela Hardiyanti dan Danial yang selalu memberikan support terbaik;
9. Seluruh rekan-rekan mahasiswa dan sahabat saya di prodi Muamalah 2017.

Penulis menyadari hasil peneltian ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan keilmuan penulis, oleh karena itu kritik dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan demi hasil peneltian yang lebih baik dan dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca.

Kendari, 16 Juni 2022

**Penulis,**



**Ardiansyah**

**NIM. 17020102025**

## ABSTRAK

Ardiansyah 17020102025. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 16/PDT.SUS-PHI/2020/PN KDI, Dibimbing Oleh: Dr. Ashadi L. Diab SHI., M. Hum

---

Akibat pandemi Covid-19, Pemutusan hubungan kerja mengalami peningkatan yang signifikan. Jumlah kasus PHK mencapai puluhan juta kasus, sebagian besar perusahaan beralibi PHK dilakukan sebagai upaya efisiensi karena keadaan memaksa (Force majeure). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan pandangan hukum islam terhadap PHK pada masa pandemi Covid-19 pada perkara Nomor 16/PDT.SUS-PHI/2020/PN KDI.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang dipertajam dengan pendekatan normatif Syar'i. Metode pengumpulan data yang digunakan berupa studi pustaka terhadap bahan hukum maupun bahan non hukum dan dalam teknik pengolahan data, penulis menggunakan metode seleksi, klasifikasi dan penggolongan.

Dari hasil penelitian pada perkara nomor 16/PDT.SUS-PHI/2020/PN KDI, penulis kemudian menyimpulkan bahwa *fasakh* atau PHK yang dilakukan oleh PT. Cilacap Samudera Fishing Industry cabang Kendari kepada 4 pekerjanya merupakan sesuatu yang tidak terhindarkan sebab adanya keadaan yang memaksa (force majeure) akibat pandemi covid-19, olehnya dalam perkara ini *fasakh* diperbolehkan.

Tindakan perusahaan yang melakukan PHK harusnya disertai dengan pesangon sebagai konsekuensi yang timbul akibat PHK. Pada prinsipnya, prosedur penyelesaian perselisihan dalam hukum konvensional maupun penyelesaian dalam hukum Islam memiliki konsep dan tahap penyelesaian yang sama, yaitu mengedepankan musyawarah sebelum ke tahap lembaga peradilan. Berdasarkan Al Qur'an dan Hadist, putusan majelis hakim telah sejalan dengan amanat Undang-undang dan kaidah dalam hukum Islam. Olehnya tenaga kerja yang di-PHK berhak atas pesangon dan upah lainnya.

**Kata Kunci:** Pemutusan Hubungan Kerja, Force Majeure, Fasakh.

## ABSTRACT

Ardiansyah 17020102025. Analysis of Islamic Law on Termination of Employment (PHK) During the Covid-19 Pandemic (Study of Kendari District Court Decision Number 16/PDT.SUS-PHI/2020/PN KDI). Supervised by: DR. ASHADI L. DIAB SHI., M. Hum

---

Due to the Covid-19 pandemic, layoffs have experienced a significant increase. The number of cases of layoffs reaches tens of millions of cases, most of the companies claim that the layoffs are carried out as an efficiency measure due to force majeure. The purpose of this study was to analyze and describe the views of Islamic law on layoffs during the Covid-19 pandemic in case Number 16/PDT.SUS-PHI/2020/PN KDI.

This research is a normative legal research, using a statutory approach and a case approach that is sharpened by a Shari'i normative approach. The data collection method used is a literature study of legal and non-legal materials and in data processing techniques, the authors use the method of selection, classification and classification.

From the results of the research on case number 16/PDT.SUS-PHI/2020/PN KDI, the author then concluded that the Fasakh or layoffs carried out by PT. Cilacap Samudera Fishing Industry Kendari branch to its 4 workers is something that is unavoidable due to force majeure due to the covid-19 pandemic, in this case, Faskh is allowed.

The company's actions that carry out layoffs must be accompanied by severance pay as a consequence of the layoffs. In principle, the procedure for resolving disputes in conventional law and settlement in Islamic law has the same concept and stages of settlement, namely prioritizing deliberation before going to the stage of the judiciary. Based on the Qur'an and Hadith, the decision of the panel of judges is in line with the mandate of the law and the rules of Islamic law. Therefore, workers who are laid off are entitled to severance pay and other wages.

**Keywords: Laid Off, Force Majeure, Fasakh.**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	iii
ABSTRAK .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.4.1 Manfaat Bagi Pengusaha .....	11
1.4.2 Manfaat Bagi Tenaga Kerja.....	11
1.4.3 Manfaat Bagi Pemerintah .....	11
1.4.4 Manfaat Bagi Akademik.....	12
1.4.5 Manfaat Bagi Peneliti .....	12
1.4 Fokus Penelitian .....	12
BAB II.....	13
2.1 Relevansi Penelitian.....	13
2.2 Tinjauan Umum Tentang Ketenagakerjaan.....	16
2.2.1 Pengertian Tenaga Kerja .....	16
2.2.2 Konsep Perjanjian Kerja dan Hubungan kerja .....	17
2.2.3 Bentuk-bentuk Perjanjian Kerja .....	19
a. Perjanjian Kerja Lisan.....	20
b. Perjanjian Kerja Tertulis .....	20
2.2.4 Jenis Perjanjian Kerja.....	21
a. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) .....	21
b. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).....	22
2.2.5 Penempatan Kerja (Mutasi) .....	22
2.3 Tinjauan Ketenagakerjaan Dalam Islam.....	24
2.4 Tinjauan Tentang PHK di Masa Pandemi Covid-19 .....	30
2.5 Kerangka Teori .....	35

.....	35
BAB III.....	36
3.1 Jenis Penelitian.....	36
3.2 Pendekatan Penelitian.....	37
3.3 Lokasi Penelitian .....	38
3.4 Populasi dan Sampel .....	39
3.4.1 Populasi.....	39
3.4.2 Sampel .....	40
3.5 Narasumber .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	40
3.7 Sumber Data.....	39
3.8 Metode Pengolahan Data .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.9 Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV .....	42
4.1 Gambaran Umum Pengadilan Negeri Kendari.....	42
4.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Kendari .....	43
4.1.2 Visi dan Misi Pengadilan Negeri Kendari .....	43
4.2 Pertimbangan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Memutus Perkara Nomor 16/PDT.SUS-PHI/2020/PN KDI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB V.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5.1 Prosedur Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada Perkara Nomor 16/PDT.SUS-PHI/2020/PN KDI .....	43
5.2 Analisis Hukum Islam Terhadap PHK Sepihak Pada Putusan Perkara Nomor 16/PDT.SUS-PHI/2020/PN KDI.....	58
BAB VI .....	70
6.1 Kesimpulan.....	70
6.2 Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA .....	73
LAMPIRAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>